

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tingginya harapan masyarakat akan terwujudnya *good corporate governance* dan penyelenggaraan organisasi sektor publik yang efektif, efisien, transparan, akuntabel serta bersih dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme membutuhkan peningkatan peran dari pengawasan internal. Dalam penyelenggaraanya *good governance* tidak hanya ditujukan bagi pemerintah pusat namun pemerintah daerah juga dituntut untuk melakukan *good governance* agar tercipta tata kelola pemerintahan yang baik di setiap lini pemerintahan. Dalam beberapa tahun terakhir, permasalahan hukum terutama berkaitan dengan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dengan segala praktiknya seperti penyalahgunaan wewenang, penyuapan, pemberian uang pelicin, pungutan liar, pemberian imbalan atas dasar kolusi dan nepotisme serta penggunaan uang negara untuk kepentingan pribadi telah menjadi perhatian masyarakat dan dianggap sebagai suatu hal yang lazim terjadi di negara ini.

BPKP adalah organisasi yang diberikan tugas oleh pemerintah untuk memeriksa transparansi dalam pelaporan dan praktik pengelolaan realisasi anggaran sektor publik, mengawasi realisasi anggaran daerah yang diperoleh dan menggunakan anggaran dari pemerintah pusat serta bertujuan mengembangkan aspek-aspek ekonomi yang berpotensi dari daerah tersebut. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagai auditor

internal pemerintah berperan penting dalam mendorong upaya pemberantasan korupsi. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam melakukan audit dilakukan oleh auditor. Auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) merupakan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) yang merupakan salah satu unsur manajemen pemerintah yang penting dalam rangka tata pemerintahan yang baik. Dalam menjalankan fungsi audit, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perlu didukung oleh kinerja auditornya. Kinerja auditor merupakan tindakan atau pelaksanaan tugas pemeriksaan yang telah diselesaikan oleh auditor dalam kurun waktu tertentu.

Suatu pengawasan intern yang dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang terdapat dalam suatu Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang terdiri dari audit, review, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya. Pengawasan disini bersifat membantu supaya sasaran yang telah ditetapkan organisasi dapat tercapai, dan secara dini dapat menghindari terjadinya penyimpangan penyelenggaraan, penyalahgunaan wewenang, pemborosan dan kebocoran. Audit merupakan salah satu bagian dari pengawasan, pada praktisnya terdiri dari suatu tindakan untuk mencari keterangan tentang apa yang dilaksanakan dalam suatu instansi yang akan diperiksa, dan membandingkan hasilnya dengan kriteria yang telah ditetapkan, dan menyetujui atau menolak hasil yang telah dibuat dan memberikan rekomendasi mengenai tindakan perbaikan (Sukriah *et al*, 2009: 2 dalam Wandita *et al*, 2014)

De Angelo (1981) dalam Badjuri (2012) mendefinisikan kualitas audit merupakan suatu kemungkinan dimana seorang auditor menemukan serta melaporkan mengenai adanya suatu pelanggaran yang dilakukan klien dalam sistem akuntansi. Pelanggaran yang dimaksud adalah ketidaksesuaian antara pernyataan tentang kejadian ekonomi klien dengan kriteria yang telah ditetapkan. Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menyatakan bahwa audit yang dilakukan oleh auditor dikatakan berkualitas apabila memenuhi standar auditing dan standar pengendalian mutu. Menurut Tan dan Alison (1999) dalam Salsabila dan Prayudiawan (2011) kualitas hasil kerja audit tersebut berhubungan dengan seberapa baik sebuah pekerjaan diselesaikan dibandingkan dengan kriteria yang telah ditetapkan. Untuk auditor, kualitas kerja dilihat dari kualitas audit yang dihasilkan yang dinilai dari seberapa banyak auditor memberikan respon yang benar dari setiap pekerjaan audit yang diselesaikan.

Seorang auditor profesional harus mempunyai pengalaman yang cukup tentang tugas dan tanggung jawabnya. Pengalaman auditor akan menjadi bahan pertimbangan yang baik mengambil keputusan dalam tugasnya (Libby dan Trotman 2011 dalam Lestari *et al*, 2015). Pengalaman audit juga memberikan dampak untuk setiap keputusan yang akan diambil dalam melaksanakan audit sehingga diharapkan setiap keputusan yang akan diambil merupakan keputusan yang tepat. Jadi, dapat dikatakan bahwa semakin lama masa kerja yang dimiliki auditor, akan semakin baik pula kualitas audit yang dihasilkan (Sukriah *et al*, 2009: 4 dalam Wandita *et al*,

2014). Pengalaman kerja seseorang menunjukkan jenis-jenis pekerjaan yang pernah dilakukan seseorang dan memberikan peluang yang besar bagi seseorang untuk melakukan pekerjaan yang lebih baik. Semakin luas pengalaman kerja seseorang, semakin trampil melakukan pekerjaan dan semakin sempurna pola berpikir dan sikap dalam bertindak untuk mencapai tujuan. Auditor yang tidak berpengalaman akan melakukan atribusi kesalahan lebih besar dibandingkan dengan auditor yang berpengalaman, sehingga dapat mempengaruhi kualitas.

Independensi auditor merupakan salah satu faktor yang penting untuk menghasilkan audit yang berkualitas. Jika auditor kehilangan independensinya, laporan audit yang dihasilkan tidak sesuai dengan kenyataan yang ada sehingga tidak dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Dalam standar umum kedua dalam Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SKPN) mengharuskan bahwa auditor harus mempertahankan sikap independen (tidak mudah dipengaruhi), karena ia melaksanakan pekerjaannya untuk kepentingan umum. Auditor tidak hanya berkewajiban mempertahankan sikap mental independen, tetapi juga harus menghindari hal-hal yang dapat mengakibatkan independensinya diragukan masyarakat. Auditor harus dapat mengumpulkan setiap informasi yang dibutuhkan dalam pengambilan keputusan audit dimana hal tersebut harus didukung dengan sikap independen (Sukriah *et al*, 2009 dalam Lestari *et al*, 2015).

Menurut Peraturan Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara, bersikap objektif merupakan cara berpikir yang tidak berpihak, jujur secara intelektual, dan bebas dari benturan kepentingan. Maburri dan Winarna (2010) dalam Ariani dan Badera (2015) menyatakan semakin tinggi objektivitas auditor, semakin baik kualitas hasil pemeriksaan. Kualitas audit merupakan salah satu indikator yang digunakan dalam menilai kinerja auditor internal. Sehingga, dengan tingginya sikap objektivitas auditor kualitas hasil pemeriksaan akan semakin baik, kualitas audit yang baik mencerminkan kinerja yang baik pula. Ayuningtyas (2012) dalam (Arianti *et al*, 2014) berdasarkan hasil penelitiannya menunjukkan bahwa objektivitas berpengaruh signifikan terhadap kualitas hasil pemeriksaan.

Integritas auditor dapat berpengaruh terhadap kualitas audit. Menurut Sukriah *et al* (2009) dalam Parasayu dan Rohman (2014) menyatakan bahwa integritas dapat menerima kesalahan yang tidak disengaja dan perbedaan pendapat yang jujur, tetapi tidak dapat menerima kecurangan prinsip. Dengan integritas yang tinggi, auditor dapat meningkatkan kualitas hasil auditnya (Pusdiklatwas BPKP, 2008) dalam Parasayu dan Rohman (2014). Auditor harus senantiasa menjaga integritas yang dimilikinya dalam melaksanakan pekerjaan audit. Sikap integritas auditor diperlukan karena berkaitan dengan kualitas audit yang dihasilkan. Dengan adanya integritas yang tinggi yang diiringi dengan meningkatnya kualitas audit, tentunya akan dapat meningkatkan kepercayaan dari publik terhadap pemerintahan. Karena

dengan adanya kualitas audit yang tinggi akan mendukung kelancaran dalam pelaksanaan kegiatan Pemerintahan (Arianti *et al*, 2014).

Dalam meningkatkan kualitas audit, seorang auditor sangat bergantung pada tingkat kompetensinya. Prihartini (2015) mengungkapkan bahwa kompetensi auditor merupakan kemampuan auditor untuk mengaplikasikan pengetahuan dan pengalaman yang dimilikinya dalam melakukan audit sehingga auditor dapat melakukan audit dengan teliti, cermat, *intuitif*, dan objektif. Hal ini berarti semakin tinggi kompetensi seorang auditor internal, akan menghasilkan kualitas audit yang semakin baik. Seorang auditor yang memiliki tingkat pendidikan yang tinggi, wawasan yang luas serta sering mengikuti pelatihan-pelatihan selama menjadi auditor merupakan dasar yang digunakan dalam melakukan audit untuk mencapai kualitas audit yang baik. Kompetensi sangat diperlukan oleh seorang auditor dalam menjalankan tugasnya sehingga dapat menghasilkan laporan audit yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan. Sejalan dengan pendapat Maburri dan Winarna (2010), yang menyatakan bahwa auditor ketika mengaudit harus memiliki keahlian yang meliputi dua unsur yaitu pengetahuan dan pengalaman.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul:

“PENGARUH INDEPENDENSI, INTEGRITAS, OBJEKTIVITAS, PENGALAMAN KERJA, DAN KOMPETENSI TERHADAP KUALITAS AUDIT” (Studi Empiris Pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, penelitian ini akan menganalisa tentang pengaruh independensi, integritas, objektivitas, pengalaman kerja, dan kompetensi terhadap kualitas audit pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta. Sehingga yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah independensi berpengaruh terhadap kualitas audit?
2. Apakah integritas berpengaruh terhadap kualitas audit?
3. Apakah objektivitas berpengaruh terhadap kualitas audit?
4. Apakah pengalaman kerja berpengaruh terhadap kualitas audit?
5. Apakah kompetensi berpengaruh terhadap kualitas audit?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini untuk:

1. Menganalisis pengaruh independensi terhadap kualitas audit.
2. Menganalisis pengaruh integritas terhadap kualitas audit.
3. Menganalisis pengaruh objektivitas terhadap kualitas audit.
4. Menganalisis pengaruh pengalaman kerja terhadap kualitas audit.
5. Menganalisis pengaruh kompetensi terhadap kualitas audit.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini juga bermaksud untuk memberikan manfaat bagi pihak yang memerlukan, termasuk dari pihak Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta dan publik sebagai pembacanya, adapun manfaatnya sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan informasi dan referensi pada penelitian dibidang audit guna meningkatkan kinerja dan kualitas hasil audit yang ada di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memperkuat penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan independensi, integritas, objektivitas, pengalaman kerja, kompetensi, dan kualitas audit.
- c. Diharapkan penelitian ini dapat berkontribusi dalam meningkatkan pengetahuan ilmu akuntansi khususnya audit pemerintahan, dan dapat menjadi media informasi untuk penelitian lebih lanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti
 Penelitian ini saya harapkan sebagai sarana dalam menerapkan ilmu pengetahuan saya yang telah saya peroleh dibangku kuliah Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- b. Bagi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan dasar sebagai acuan dalam meningkatkan mutu kualitas hasil audit pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta.

- c. Bagi Auditor Internal di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa memberikan hal-hal yang bisa meningkatkan kualitas dari hasil audit bagi para auditor yang ada di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta, serta bisa memberikan motivasi lebih kepada mereka. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris tentang pengaruh independensi, integritas, objektivitas, pengalaman kerja, kompetensi terhadap kualitas audit, sehingga pada hakekatnya penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi para auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta untuk lebih profesional lagi dalam menjalankan peran mereka sebagai penyedia informasi. Penelitian ini juga diharapkan kontribusi praktisnya untuk organisasi penyedia jasa akuntan terutama pada Kantor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam mengelola sumber daya manusia yang profesional.

E. Sistematika Penulisan

Dalam laporan penelitian ini, sistematika pembahasan terdiri atas lima bab, masing-masing uraian yang secara garis besar dapat diterangkan sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini menjelaskan tentang landasan teori, penelitian terdahulu, dan perumusan hipotesis.

BAB III. METODE PENELITIAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai metode penelitian yang memuat tentang variabel penelitian, definisi operasional, penentuan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data dan metode analisis data yang digunakan.

BAB IV. ANALISA DATA

Bab ini berisi penyajian dan analisis data. Pada bab penelitian menyajikan dan menyelesaikan hasil pengumpulan serta analisis data, sekaligus merupakan jawaban atas hipotesis yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya.

BAB V. PENUTUP

Bab ini menguraikan kesimpulan yang ditarik berdasarkan hasil pengolahan dan analisis data, keterbatasan-keterbatasan dalam penelitian ini serta saran-saran yang berkaitan dengan penelitian sejenis dimasa yang akan datang.